

BAB II **KAJIAN TEORI**

Pada pembahasan Bab II, penelitian akan mengeksplorasi mengenai teori yang menjadi landasan kajian di penelitian ini. Teori-teori ini memiliki peran penting dalam pemahaman masalah penelitian. Kajian pustaka ini membahas berbagai konsep dan teori yang relevan dengan penelitian pengembangan Program Adiwiyata di SMPN 3 Purwodadi Pasuruan. Kajian ini akan menjadi landasan teoritis untuk memahami kerangka program Adiwiyata, konsep sekolah berbudaya lingkungan dan berkelanjutan & kewarganegaraan ekologis, serta relevansinya dengan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Berikut adalah gambaran tentang kajian teori tersebut.:

A. Kajian Teori

1. Peran Guru PPKn

Bagian terpenting dari bab ini adalah penempatan Peran Guru PPKn sebagai aktor kunci dalam mentransformasi kesadaran lingkungan siswa. Secara teoretis, Guru PPKn merupakan ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, etika, dan tanggung jawab warga negara (Salouw et al., 2020). Posisi strategis ini menjadikannya katalisator utama untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter, termasuk karakter peduli lingkungan.

Strategi guru dalam membentuk karakter ini memerlukan pendekatan yang inovatif. Pratama (2024) mengemukakan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) oleh guru PPKn terbukti mampu meningkatkan keterlibatan emosional siswa terhadap isu lingkungan. Namun, Lestari & Wijaya (2023) juga mengingatkan adanya hambatan dalam implementasinya, seperti terbatasnya waktu dan integrasi kurikulum, sehingga diperlukan kompetensi guru yang adaptif dalam mengaitkan isu lingkungan global ke dalam materi kewarganegaraan (Hidayat, 2023)

Dalam konteks Program Sekolah Adiwiyata, peran Guru PPKn tidak hanya terbatas pada penyampaian materi kurikuler semata. Peran Guru PPKn mencakup tiga dimensi utama:

- a. Peran sebagai Teladan dan Motivator: Guru PPKn harus menjadi model bagi siswa dalam perilaku sehari-hari yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab. Guru

berfungsi sebagai teladan dan motivator (Slameto, 2010) yang mempraktikkan secara konsisten prinsip-prinsip Adiwiyata.

- b. Peran sebagai Integrator Kurikulum: Guru dituntut mampu mengaitkan isu-isu lingkungan dengan hak dan kewajiban kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Implementasi ini membutuhkan kemampuan guru untuk mengintegrasikan modul ajar berbasis lingkungan yang memadai ke dalam kurikulum PPKn (Mutia, et al., 2024), memastikan bahwa praktik Adiwiyata memiliki landasan konsep yang kuat.
- c. Peran sebagai Pelatih Partisipasi: Guru PPKn bertanggung jawab mendorong siswa untuk melihat kerusakan lingkungan sebagai isu sosial-politik yang memerlukan tindakan kewarganegaraan aktif (*Ecological Citizenship*), bukan sekadar tugas sekolah. Hal ini sejalan dengan fungsi Adiwiyata yang melibatkan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif (Subianto & August, 2021).

Peran multidimensi ini menjadi esensial karena ia menjembatani praktik Adiwiyata (sebagai metode pembiasaan) dengan fondasi filosofis Kewarganegaraan Ekologis (*Ecological Citizenship*). Luaran yang diukur dari peran Guru PPKn adalah sejauh mana proses tersebut berhasil mentransformasi Karakter Peduli Lingkungan siswa menjadi Kewarganegaraan Ekologis yang berlandaskan tanggung jawab etis dan berkelanjutan (Rahmadhani, 2025).

2. **Ecological Citizenship dalam Konsep Keberlanjutan dan Karakter Peduli Lingkungan .**

Kewarganegaraan Ekologis (*Ecological Citizenship*) adalah sebuah konsep penting yang memperluas makna menjadi warga negara. Jika kewarganegaraan tradisional hanya fokus pada hak memilih, kewajiban membayar pajak, dan ketaatan hukum negara, *Ecological Citizenship* menuntut lebih dari itu. Konsep ini mendefinisikan kembali tanggung jawab warga negara dengan memasukkan tanggung jawab terhadap lingkungan alam sebagai inti kewajiban moral. Menurut [O'Brien, 2021], Kewarganegaraan Ekologis melibatkan kesadaran bahwa tindakan lokal sekecil apa pun memiliki dampak global. Ini adalah kesadaran bahwa kita tidak hanya memiliki hak atas lingkungan yang sehat, tetapi juga kewajiban untuk melestarikan sumber daya bumi untuk generasi yang akan datang.

Pengembangan *ecological citizenship* dalam dunia pendidikan kini menjadi urgensi global. Hadiansyah & Sauri (2021) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran sentral sebagai wadah utama untuk mentransformasi siswa menjadi warga

negara yang tidak hanya sadar hak, tetapi juga tanggung jawab ekologis. Sejalan dengan hal tersebut, Maulana (2022) menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan ekologis dalam pembelajaran PPKn sangat efektif untuk membentuk pola pikir hijau yang berkelanjutan bagi generasi muda.

Perbedaan utama *Ecological Citizenship* adalah penekanan kuat pada kewajiban ketimbang hak. Warga negara ekologis memahami bahwa hak mereka untuk mengonsumsi dan menggunakan sumber daya diimbangi oleh kewajiban untuk hidup secara berkelanjutan. Konsep ini mendorong perubahan gaya hidup, misalnya, mulai dari menghemat air dan energi, mengurangi sampah, hingga memilih produk yang ramah lingkungan. Lebih dari sekadar perilaku, *Ecological Citizenship* juga menuntut partisipasi aktif dalam ruang publik. Artinya, warga negara ekologis tidak hanya bertindak sendiri, tetapi juga terlibat dalam mengadvokasi kebijakan lingkungan yang lebih baik dan menuntut akuntabilitas dari pihak-pihak yang merusak lingkungan [Dobson & Huddart-Kennedy, 2022].

Dalam konteks pendidikan di sekolah, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis sebagai media utama untuk membentuk *Ecological Citizenship*. PPKn mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang fundamental, seperti tanggung jawab sosial dan kemanusiaan, yang dapat dihubungkan langsung dengan etika lingkungan. Guru PPKn dapat mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kurikulum untuk menumbuhkan pemahaman bahwa menjaga alam adalah bagian dari kewajiban konstitusional dan perwujudan dari nilai-nilai kebangsaan [Susanti & Nurhayati, 2023]. Dengan kata lain, PPKn berfungsi sebagai jembatan yang mengubah perilaku praktis menjadi kesadaran etis yang lebih mendalam mengenai peran siswa sebagai warga negara bumi yang bertanggung jawab.

Kajian diawali dengan pendalaman terhadap Pendidikan Karakter, dengan fokus spesifik pada Karakter Peduli Lingkungan. Dalam konteks ini, karakter tidak hanya didefinisikan sebagai sikap, tetapi sebagai perpaduan antara pengetahuan (kognitif), kepedulian (afektif), dan tindakan nyata (psikomotorik) siswa dalam upaya pelestarian lingkungan (Wardani, 2020). Pembentukan karakter ini harus didukung oleh pembiasaan yang difasilitasi oleh program sekolah, yang sejalan dengan tujuan Program Adiwiyata untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada peserta didik (Subianto & August,

2021). Keberhasilan pembentukan sikap ini terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan pada siswa (Setiawati & Susanto, 2024).

Karakter peduli lingkungan merupakan manifestasi dari sikap dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya serta mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Berikut adalah pengembangan kajian teorinya:

Karakter peduli lingkungan di era modern tidak hanya dipandang sebagai perilaku menjaga kebersihan semata, tetapi telah bergeser menjadi identitas kewarganegaraan yang berbasis pada tanggung jawab ekologis. Pembentukan karakter ini memerlukan pendekatan sistematis melalui integrasi nilai-nilai lingkungan ke dalam kurikulum dan pembiasaan sehari-hari di sekolah. Melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), nilai-nilai tersebut dihubungkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, di mana menjaga kelestarian alam dianggap sebagai prasyarat utama untuk menjamin hak hidup yang sehat bagi seluruh masyarakat. (Subianto & Ramadan, 2021).

Internalisasi karakter peduli lingkungan sangat dipengaruhi oleh mekanisme habituasi atau pembiasaan yang konsisten di lingkungan pendidikan. Program Adiwiyata berfungsi sebagai wadah untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab siswa melalui kegiatan praktis seperti pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan perawatan ruang terbuka hijau. Ketika kegiatan ini dilakukan secara rutin dan partisipatif, perilaku ramah lingkungan tersebut akan bertransformasi dari sekadar kepatuhan terhadap aturan menjadi sebuah budaya sekolah yang berkesinambungan. (Saputra, Frinaldi, & Rembrandt, 2024).

Peran guru sebagai katalisator dalam menumbuhkan karakter peduli lingkungan menjadi sangat krusial, terutama dalam memberikan pemodelan perilaku (role modeling) yang nyata. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan tentang ekosistem, tetapi juga harus menunjukkan teladan dalam setiap tindakan di sekolah untuk memicu nalar kritis siswa terhadap isu-isu lingkungan. Dengan adanya interaksi yang dinamis antara guru dan siswa, kesadaran ekologis dapat tumbuh lebih efektif karena siswa merasa memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar terhadap lingkungan belajarnya. (Mutia, et al., 2024).

Keberlanjutan karakter peduli lingkungan pada generasi muda sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan sekolah, strategi pembelajaran, dan dukungan seluruh warga

sekolah. Penanaman nilai-nilai karakter yang berbasis pada kearifan lokal dan prinsip Pancasila akan memperkuat identitas siswa sebagai warga negara yang memiliki kepekaan sosial dan ekologis yang tinggi. Dengan demikian, sekolah berbudaya lingkungan bukan sekadar pencapaian administratif melalui penghargaan, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem global secara konsisten. (Setiawati & Susanto, 2024).

Namun, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengintroduksi konsep Kewarganegaraan Ekologis (*Ecological Citizenship*). Mengacu pada teori Andrew Dobson (2003) dan Barry (2006), istilah ini membedakan dirinya dari kepedulian lingkungan biasa, karena menuntut warga negara untuk tidak hanya menjalankan hak dan kewajiban politiknya, tetapi juga memiliki tanggung jawab etis terhadap keberlanjutan ekosistem dan kesadaran terhadap *ecological footprint* mereka. *Ecological Citizenship* menempatkan isu lingkungan sebagai isu keadilan (*Justice*) yang melampaui batas ruang dan waktu, menuntut tanggung jawab terhadap generasi mendatang (Barry, 2006; Rahmadhani, 2025). Penegasan istilah ini memastikan analisis luaran Program Adiwiyata tidak hanya terhenti pada kebersihan dan estetika, tetapi pada pembentukan subjek yang bertanggung jawab secara global.

Membangun sekolah yang berkelanjutan berarti menanamkan nilai-nilai yang memungkinkan warga sekolah untuk terus menjadi agen perubahan lingkungan di masa depan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat luas. Hal ini membutuhkan strategi yang melibatkan pengelolaan program dan sarana yang berkelanjutan, termasuk analisis hukum pengaruh Adiwiyata terhadap pengelolaan sampah (Saputra, Frinaldi, & Rembrandt, 2024), serta integrasi kurikulum yang didukung oleh modul ajar berbasis lingkungan yang memadai (Mutia, et al., 2024).

Dengan berfokus pada analisis peran Guru PPKn dalam menumbuhkan *Ecological Citizenship* melalui Program Sekolah Adiwiyata. Dalam kerangka ini, Program Adiwiyata bertindak sebagai laboratorium aksi nyata (tempat siswa melakukan praktik peduli lingkungan), sementara Guru PPKn bertindak sebagai katalisator yang memberikan makna kewarganegaraan pada aksi tersebut [Wibowo & Nugroho, 2024]. Guru PPKn memastikan bahwa kegiatan Adiwiyata (misalnya, membuat kompos atau menghemat listrik) dipahami siswa bukan hanya sebagai tugas sekolah, tetapi sebagai latihan awal dalam menunaikan

tanggung jawab ekologis sebagai bagian dari generasi muda yang sadar akan isu-isu keberlanjutan global dan lokal.

3. Konsep Dasar Program Adiwiyata

Secara etimologis, istilah Adiwiyata berasal dari bahasa Sanskerta, yakni "Adi" yang berarti agung, baik, sempurna, dan "Wiyata" yang berarti tempat belajar atau institusi pendidikan. Dengan demikian, Adiwiyata dapat diartikan sebagai tempat yang baik dan ideal untuk memperoleh ilmu pengetahuan, norma, serta etika dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Program Adiwiyata adalah salah satu program prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI). Tujuan utamanya adalah mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah (guru, siswa, dan karyawan) dalam upaya pelestarian lingkungan hidup (Rahmadhani, 2025). Program ini bersifat partisipatif, melibatkan seluruh komponen sekolah dan masyarakat sekitar, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pembelajaran dan pembentukan karakter peduli lingkungan (Subianto & August, 2021).

Merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS), Program Adiwiyata memiliki empat komponen utama yang menjadi indikator keberhasilan. Keempat komponen ini harus diimplementasikan secara terpadu:

- a. Kebijakan Berwawasan Lingkungan: Meliputi visi, misi, dan tujuan sekolah yang mengintegrasikan aspek pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan ini harus mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, penghematan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan lingkungan.
- a. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Lingkungan: Integrasi isu lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran formal, baik melalui materi ajar, metode pembelajaran, maupun penilaian. Guru SMP didorong untuk menggunakan modul ajar berbasis lingkungan untuk mendukung implementasi komponen ini (Mutia, et al., 2024).

- b. Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipatif: Melibatkan seluruh warga sekolah dalam berbagai aksi nyata pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah (3R), penanaman pohon, penghematan energi, dan konservasi air. Kegiatan ini menghasilkan dampak yang terukur, termasuk peningkatan sikap kepedulian lingkungan siswa (Setiawati & Susanto, 2024) serta perbaikan tata kelola, seperti pada analisis hukum pengelolaan sampah (Saputra, Frinaldi, & Rembrandt, 2024).
- c. Pengelolaan Sarana Prasarana Pendukung Ramah Lingkungan: Ketersediaan dan pengelolaan fasilitas sekolah yang mendukung upaya pelestarian lingkungan, seperti tempat sampah terpilah, biopori, sumur resapan, IPAL, dan area hijau.

Keempat komponen ini saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh, di mana tujuannya tidak hanya menciptakan sekolah yang bersih, tetapi mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan yang berkelanjutan.

4. Relevansi dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Program Adiwiyata memiliki relevansi yang sangat kuat dan sinergis dengan visi dan misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya dalam pembentukan karakter dan warga negara yang bertanggung jawab secara ekologis. PPKn merupakan ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, etika, dan tanggung jawab warga negara (Hardiyana, 2014; Salouw et al., 2020), yang mana nilai-nilai ini diperkuat oleh implementasi Adiwiyata.

- a. Pembentukan Karakter: PPKn bertujuan membentuk karakter peserta didik yang bertanggung jawab. Aspek "bertanggung jawab" ini sangat relevan dengan Karakter Peduli Lingkungan, yang mana keberhasilannya terbukti mengalami peningkatan signifikan setelah Program Adiwiyata diterapkan di sekolah (Setiawati & Susanto, 2024). Nilai-nilai seperti gotong royong dan kepedulian sosial, yang merupakan inti dari Pancasila, dapat dikembangkan melalui kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dalam Adiwiyata.
- b. Hak dan Kewajiban Warga Negara: Salah satu materi pokok dalam PPKn adalah hak dan kewajiban warga negara. Menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Program Adiwiyata memberikan wadah praktis bagi siswa untuk memahami dan melaksanakan kewajiban, serta menuntut hak mereka atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat,

sesuai dengan prinsip Kewarganegaraan Ekologis (*Ecological Citizenship*) (Rahmadhani, 2025).

- c. Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air: Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup juga merupakan wujud dari wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. Melalui pengelolaan lingkungan sekolah, siswa telah berpartisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia (Saputra, Frinaldi, & Rembrandt, 2024).
- d. Partisipasi Publik dan Demokrasi: Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif (Subianto & August, 2021) dalam Adiwiyata melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program di sekolah. Hal ini merupakan simulasi awal dari partisipasi dalam kehidupan bernegara yang demokratis, sejalan dengan peran guru sebagai Pelatih Partisipasi (Slameto, 2010).
- e. Pengembangan Nilai-nilai Pancasila: Nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasikan melalui berbagai aktivitas Adiwiyata. Misalnya, keadilan sosial terkait dengan distribusi sumber daya lingkungan yang merata, yang dapat didukung oleh kemampuan Guru PPKn untuk mengintegrasikan modul ajar berbasis lingkungan yang memadai (Mutia, et al., 2024) ke dalam materi Pancasila.

Dengan demikian, pengembangan Program Adiwiyata di SMPN 3 Purwodadi Pasuruan tidak hanya mendukung tercapainya tujuan pendidikan lingkungan, tetapi juga secara sinergis memperkuat implementasi pendidikan karakter dan kewarganegaraan yang menjadi inti dari mata pelajaran PPKn.

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini menggunakan acuan pada sejumlah studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas. Beberapa hasil temuan dari penelitian sebelumnya yang dianggap relevan akan dijadikan bahan kajian oleh peneliti.

Table 1 Hasil Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan (Variabel/Fokus)	Perbedaan (Fokus/Lokasi/Tingkat Kedalaman)
1	Ika Setiawati, Ratnawati Susanto (2024)	Pengaruh Penerapan Program Adiwiyata Terhadap Sikap Kepedulian Lingkungan Pada Siswa Sekolah Dasar	Fokus utama pada Program Adiwiyata sebagai variabel yang memengaruhi Kepedulian Lingkungan (karakter/sikap siswa).	Tidak melibatkan Guru PPKn secara spesifik. Subjek penelitian adalah Siswa Sekolah Dasar (SD) bukan SMP. Tidak mengkaji konsep Ecological Citizenship
2	Harmediyulian Saputra, dkk. (2024)	Analisis Hukum Pengaruh Adiwiyata Terhadap Pengelolaan Sampah Di Sekolah: Literature Review	Fokus pada Program Adiwiyata dan implementasinya (pengelolaan sampah) di sekolah. Menggunakan studi literatur sebagai metode penelitian yang mendukung kerangka teoritis.	Lebih menekankan pada aspek hukum dan kebijakan, bukan peran guru dan pembentukan karakter. Objek kajian adalah pengelolaan sampah secara umum, bukan dimensi Ecological Citizenship
3	Tuti Mutia, dkk. (2024)	Persepsi Guru SMP Laboratorium UM Terhadap Modul Ajar Berbasis Lingkungan Dalam Mendukung	Mengkaji konteks Sekolah Menengah Pertama (SMP) Fokus pada integrasi lingkungan ke dalam pembelajaran/modul ajar Meneliti Peran Guru (persepsi mereka) dalam mendukung Adiwiyata.	Tidak fokus pada Guru PPKn secara spesifik Meneliti persepsi guru bukan analisis peran dan strategi implementasi Tidak mengaitkan hasil dengan luaran Ecological Citizenship.

No.	Nama Penulis (Tahun)	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan (Variabel/Fokus)	Perbedaan (Fokus/Lokasi/Tingkat Kedalaman)
		Program Adiwiyata		
4	Bambang Subianto, dkk. (2021)	Analisis Program Adiwiyata di Sekolah Dasar	Menganalisis Implementasi Program Adiwiyata yang mencakup empat komponen (kebijakan, kurikulum, partisipasi, sarana)	Subjek penelitian adalah Sekolah Dasar (SD), bukan SMP. Tidak spesifik mengkaji Peran Guru PPKn atau konsep Ecological Citizenship.
5	Indah Kusuma Pradini, dkk. (2018)	Implementasi Program Sekolah Adiwiyata Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SDN Tanah Tinggi 3 Kota Tangerang.	Fokus pada Implementasi Program Adiwiyata sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembentukan karakter dan pembiasaan.	Subjek penelitian adalah Sekolah Dasar (SDN). Tidak spesifik membahas peran mata pelajaran PPKn. Fokus lokasi di Kota Tangerang, bukan Pasuruan.

C. Kerangka Berfikir

KERANGKA BERPIKIR

